

**IDENTIFIKASI TREN DAN STRATEGI DIPLOMASI PUBLIK  
MELALUI PERPUSTAKAAN**

**Raisya Bintang Sulaiman Putri**  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
[raiswabintang20@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:raiswabintang20@mhs.uinjkt.ac.id)

---

---

## Abstrak

Penelitian ini mengidentifikasi tren dan strategi diplomasi publik melalui perpustakaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibliometrik menggunakan *database Dimensions AI* dan VOS Viewer dengan rentang tahun 2004 – 2022. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 1024 publikasi dengan tema diplomasi publik dan perpustakaan serta tren publikasi yang bersifat fluktuatif setiap tahunnya. Penelitian ini juga mengidentifikasi tiga strategi yang digunakan dalam diplomasi publik melalui perpustakaan, di antaranya program kerja sama dan hibah buku perpustakaan, program kepastakawanan dan pertukaran pustaka serta pameran seni visual. Meskipun terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai peran perpustakaan sebagai sarana diplomasi publik faktanya belum terdapat penelitian yang menggunakan konsep diplomasi perpustakaan terkait tema ini, sehingga efektivitas diplomasi publik melalui perpustakaan perlu dikaji lebih mendalam. Kendati demikian, perpustakaan sebagai instrumen pendidikan dan penyebaran nilai-nilai nasional terutama demokrasi telah memberikan pengaruh positif bagi masyarakat di berbagai negara.

Kata kunci: Diplomasi Publik, Perpustakaan, Bibliometrik, *Dimensions AI*, VOS Viewer

## **Abstract**

This research aims to identify trends and strategies of public diplomacy through libraries. The method used in this research is bibliometrics using Dimensions AI and VOS Viewer *databases* with a range of years 2004 - 2022. The results showed that there were 1024 publications with the theme of public diplomacy and libraries and publication trends that fluctuate every year. This study also identified three strategies used in public diplomacy through libraries, including cooperation programs and library book grants, librarianship programs and library exchanges and visual arts exhibitions. Although there are several studies that discuss the role of libraries as a means of public diplomacy, in fact, there is no research that uses the concept of library diplomacy related to this theme, so the effectiveness of public diplomacy through libraries needs to be studied more deeply. Nevertheless, libraries as an instrument of education and dissemination of national values, especially democracy, have had a positive influence on society in various countries.

Keywords: Public Diplomacy, Library, Bibliometrics, Dimensions AI, VOS Viewer

## PENDAHULUAN

Diplomasi didefinisikan sebagai usaha suatu negara dalam menjalankan kebijakan luar negerinya untuk mencapai tujuan nasional (Wangke, 2020). Secara umum, diplomasi terbagi ke dalam dua jenis, yaitu *hard diplomacy* dan *soft diplomacy*. *Hard diplomacy* merupakan jenis diplomasi yang mengarah pada tindakan yang lebih keras seperti penggunaan kekuatan militer dan konflik bersenjata. Sementara *soft diplomacy* melibatkan jalan yang lebih damai, seperti diplomasi publik yang bertujuan untuk membangun atau memperkuat persepsi positif suatu negara terhadap masyarakat internasional (Prayuda Rendi & Sundari Rio, 2020).

Dalam Hubungan Internasional, diplomasi publik diartikan sebagai segala upaya pemerintah untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat internasional dengan tujuan memberi informasi untuk membangun persepsi dan memberikan pengaruh terhadap tindakan pemerintah negara lain. Lebih lanjut, persepsi yang telah dibangun diharapkan mampu mendukung tujuan pihak yang melakukan diplomasi publik (Setiawan, 2019).

Diplomasi publik dapat dilakukan melalui cara yang formal maupun informal. Pada umumnya cara formal yang dilakukan dapat berupa penyampaian pernyataan-pernyataan resmi pada pertemuan dan konferensi internasional. Sedangkan, cara informal dapat dilakukan melalui media informasi sebagai wadah membangun opini yang mendukung strategi pemerintah. Diplomasi publik sangat penting khususnya bagi negara-negara kecil dan berkembang karena diplomasi publik adalah sarana utama bagi pemerintah untuk meningkatkan citra internasional (Setiawan, 2019).

Seiring dengan berkembangnya politik internasional, aktor-aktor yang terlibat dalam proses diplomasi juga mengalami perkembangan. Diplomasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah suatu negara (*state actor*) melainkan juga melibatkan non-negara (*non-state actor*). *Non-state actor* dalam diplomasi mencakup berbagai pihak di antaranya, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah atau multinasional, jurnalis atau media, pakar di berbagai sektor industri, politik, dan anggota masyarakat (Setiawan, 2019).

Diplomasi publik memainkan peran penting karena berupaya untuk membangun komunikasi dengan berbagai aktor termasuk aktor negara dan non-negara serta publik secara global, untuk memberikan informasi, mempengaruhi dan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan politik. Pada umumnya pemerintah setiap negara, berkomunikasi dengan khalayak asing melalui berbagai mekanisme, termasuk media internasional, membina jurnalis dan peneliti internasional, kegiatan

budaya, pertukaran pendidikan dan beasiswa pelajar, kunjungan dan konferensi terprogram, dan publikasi (Setiawan, 2019).

Sebagai salah satu lembaga negara yang bertanggung jawab atas sumber media informasi masyarakat suatu negara, perpustakaan nasional memiliki peran penting dalam upaya diplomasi publik suatu negara. Perpustakaan didefinisikan sebagai institusi pengelola koleksi karya tulis, cetak, dan/atau rekam secara profesional melalui sistem untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka (Undang-Undang RI 1945, 2007). Perpustakaan juga berfungsi sebagai penyedia layanan informasi yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyebaran, pengawetan, dan pelestarian informasi. Seiring dengan berkembangnya zaman, perpustakaan juga mengalami perluasan fungsi seperti sebagai pusat penelitian, rekreasi, dan pelestarian khasanah budaya bangsa (Endarti, 2022).

Dalam memenuhi kewajibannya sebagai penyedia layanan informasi, perpustakaan dapat melakukan kerja sama dengan perpustakaan maupun pihak lainnya secara bilateral maupun multilateral. Kerja sama pada ranah perpustakaan di Indonesia dilandaskan pada UU No.43 tahun 2007 Bab XI pasal 42 yang menyatakan bahwa perpustakaan dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka (Undang-Undang RI 1945, 2007). Namun, kerja sama antar perpustakaan tidak hanya dapat meningkatkan layanan koleksi dan informasi antar perpustakaan, melainkan juga dapat sebagai sarana untuk membangun citra sebuah perpustakaan kepada pihak eksternal.

Citra atau identitas telah menjadi salah satu komponen penting dalam perpustakaan, karena identitas tersebut secara garis besar akan menggambarkan kualitas layanan perpustakaan. Dengan demikian semakin baik pengembangan fasilitas dan layanan yang dapat ditawarkan pemustaka maka akan semakin baik pula citra suatu perpustakaan (Išoraitė, 2018). Faktanya citra yang dilakukan perpustakaan tidak hanya dapat meningkatkan dampak positif bagi perpustakaan melainkan juga akan meningkatkan citra bagi negara perpustakaan tersebut.

Sebagai salah satu penyedia layanan informasi, perpustakaan juga turut menjadi indikator bagi kemajuan suatu negara karena salah satu indikator dari negara maju dapat diukur melalui tingkat pendidikan masyarakatnya (*World Bank Open Data*, 2014). Perpustakaan juga memiliki peran dalam membentuk citra positif suatu negara sehingga memiliki andil dalam upaya diplomasi publik suatu negara.

Melansir *database* dimentions AI terdapat beberapa penelitian yang mengemukakan peran perpustakaan terhadap upaya diplomasi publik

suatu negara (*"Librarian" AND "Public Diplomacy" In Publications - Dimensions*, 2020). Penelitian ini akan menganalisa perkembangan dan strategi upaya diplomasi publik melalui perpustakaan menggunakan metode bibliometrik. Analisa bibliometri bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait tema yang diambil dengan tujuan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan melalui variabel lain terkait tema yang sedang diteliti (Donthu et al., 2021).

Penelitian ini juga menggunakan *Dimension AI* serta *software VOS Viewers* sebagai alat analisa. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran secara jelas terkait perkembangan dan strategi upaya diplomasi publik melalui perpustakaan. Dengan demikian fokus dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah berupa *"Bagaimana perkembangan diplomasi publik perpustakaan berdasarkan pendekatan bibliometrik"* dan *"Bagaimana strategi diplomasi publik melalui perpustakaan berdasarkan pendekatan bibliometrik"*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *database* dari situs *Dimensions AI* dan *software VOS Viewers* untuk mengidentifikasi perkembangan dan strategi upaya diplomasi publik melalui perpustakaan. Analisa bibliometrik digunakan untuk mengetahui perkembangan diplomasi publik melalui perpustakaan berdasarkan afiliasi, dokumen berdasarkan geografi, nama penulis, dan berdasarkan tren yang meningkat selama delapan belas tahun terakhir. Penelitian ini menggunakan kata kunci *"librianship"* dan *"public diplomacy"* dari mesin pencari *Dimensions AI* (Donthu et al., 2021).

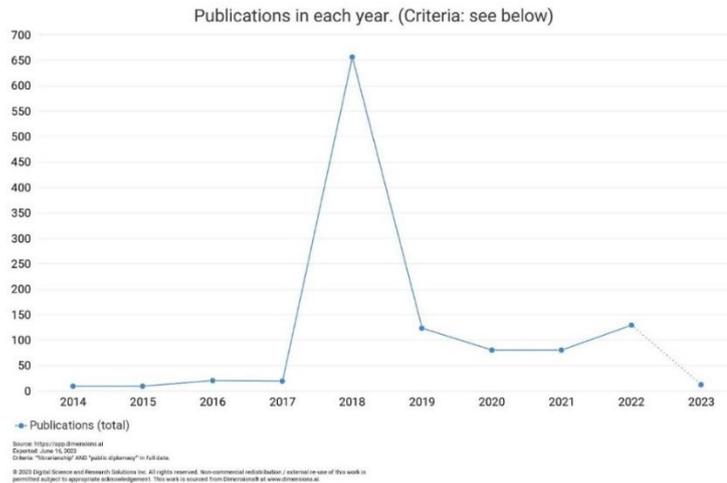
**Ekstraksi.** Penelitian ini akan memisahkan dan memvisualisasikan hasil penelusuran menggunakan kata kunci *"librianship"* dan *"public diplomacy"* dari mesin pencari *Dimensions AI*. Data tersebut kemudian akan diekstraksi menggunakan fitur *Dimensions AI*, kemudian diimpor dan dimasukkan ke perangkat lunak *VOS Viewers* untuk membuat peta kemajuan berdasarkan data yang terkumpul (Donthu et al., 2021).

**Analisis.** Penelitian ini akan menganalisa perkembangan diplomasi publik melalui perpustakaan dengan berbagai variabel yang meliputi identifikasi data, jenis publikasi, jurnal, negara, wilayah penelitian. Fitur *Dimensions AI* dan *software VOS Viewers* digunakan untuk mengidentifikasi literatur yang diterbitkan dan keterkaitan antara satu variabel dan variabel lainnya dengan menggunakan teknik bibliometrik. Oleh karena itu, metode serupa diterapkan dalam meninjau literatur tentang implementasi

kebijakan, evaluasi, pembelajaran, dan evolusi ilmu pengetahuan (Donthu et al., 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

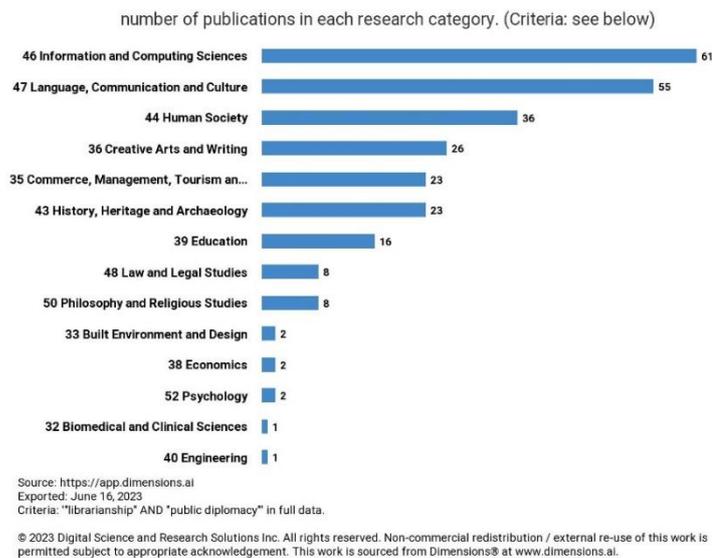
### A. TREN DIPLOMASI PUBLIK MELALUI PERPUSTAKAAN



Gambar 1 : Tren Publikasi Diplomasi Publik Melalui Perpustakaan 2004 – 2022  
Sumber: *database Dimensions AI* 2004 - 2022 diolah oleh penulis

Berdasarkan analisis bibliometrik pada laman *Dimensions AI*, terdapat 1024 dokumen dengan rentang tahun tahun 2004-2022 yang berkaitan dengan tema diplomasi publik melalui perpustakaan. Riset bibliometrik juga menggambarkan bahwa tren diplomasi publik melalui perpustakaan bersifat fluktuatif. Berdasarkan penelitian bibliometrik yang dianalisis melalui *Dimensions AI*, jika melihat Gambar 1, terlihat bahwa grafik publikasi mengenai diplomasi publik melalui perpustakaan mengalami perubahan yang tidak stabil. Publikasi tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah 650 publikasi dan publikasi terendah terjadi pada tahun 2014 dan 2015 dengan jumlah 9 publikasi. Meskipun mengalami penurunan secara drastis, jumlah publikasi pada tahun 2019 masih tetap lebih banyak dari tahun 2014 – 2017. Pada tahun 2022 jumlah publikasi terkait diplomasi publik dan perpustakaan mengalami peningkatan dari tahun 2021 meskipun tidak lebih banyak dari total publikasi di tahun 2018. Dari total publikasi yang terdapat pada laman *Dimensions AI*, 1005 terpublikasi dalam bentuk sub-bab, 96 dalam bentuk buku, 65 dalam bentuk artikel, 37 dalam bentuk *monograph*, dan 1 dalam bentuk *proceeding*.

## TEMPAT PUBLIKASI



Gambar 2 : Tempat Publikasi Diplomasi Publik Melalui Perpustakaan Berdasarkan Kategori Riset 2004 – 2022

Sumber: *database Dimensions AI 2004 - 2022* diolah oleh penulis

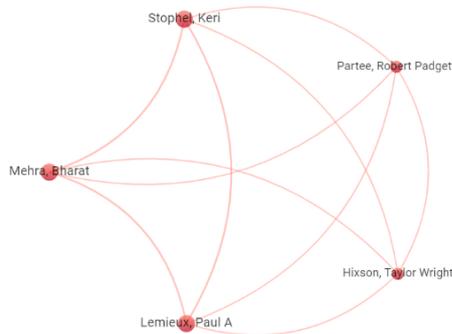
Dari 1024 yang berkaitan dengan tema diplomasi publik rentang dalam *database Dimensions AI* tahun 2004 – 2022, presentasi tempat publikasi dalam kajian ilmu perpustakaan dan diplomasi publik memperlihatkan hasil yang cukup beragam yang mencakup, *Informations and Computing Sciences, Language, Communication and Culture, Human Society, Creative Arts and Writing, Commerce, Management and Tourism, History, Heritage, and Archeology, Education, Law and Legal Studies, Phliosophy and Religious Studies, Built Environment and Design, Economics, Psychology, Biomedical and Clinical Science, dan Engineering.*

Berdasarkan Dimension AI, publikasi terbanyak diterbitkan oleh laman jurnal *Informations and Computing Sciences* dengan total 61 publikasi. *Languge, communication and culture* menempati posisi kedua dengan jumlah 55 publikasi. Urutan selanjutnya diduduki oleh lama jurnal *Human Society* dengan jumlah 36 publikasi, *Creative Arts and Writing* sebanyak 26 publikasi, laman jurnal *Commerce, Management and Tourism, History* dan *Heritage, and Archeology* dengan masing-masing 23 publikasi, serta laman jurnal *Education* dengan total 16 publikasi.

Pada bidang ilmu lain seperti *Built Environment and Design, Economics, Psychology, Biomedical and Clinical Sciences, dan Engineering* merupakan bidang ilmu yang sedikit menerbitkan publikasi dengan tema terkait. Publikasi pada *Built Environment and Design, Economics, Psychology* hanya

berjumlah 2 publikasi dan *Biomedical and Clinical Sciences* dan *Engineering* hanya berjumlah 1 publikasi.

## PENULIS

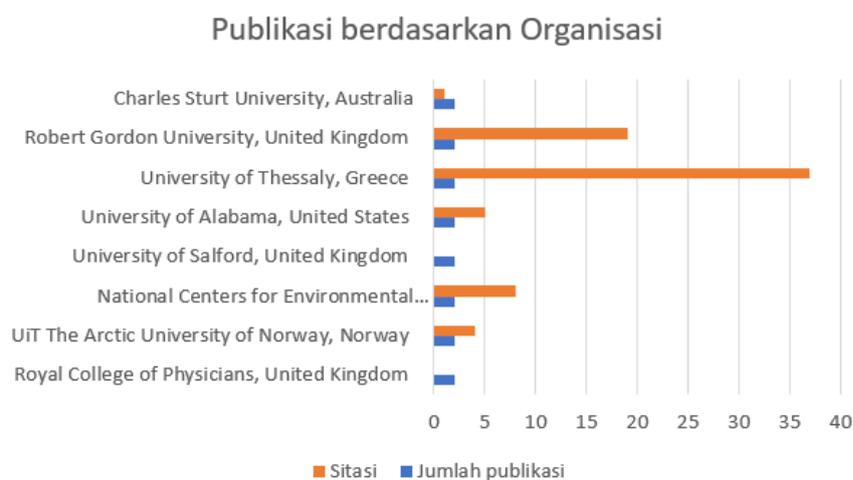


Gambar 3 : Penulis Diplomasi Publik Melalui Perpustakaan *Database Dimensions AI/2004 – 2022*

Sumber: *database Dimensions AI 2004 - 2022* diolah oleh penulis

Gambar di atas menjelaskan para penulis yang saling berhubungan dalam jaringan penulisan diplomasi melalui perpustakaan. Terdapat lima penulis yang saling mengutip antara satu sama lain. Adanya tulisan mengenai diplomasi publik melalui perpustakaan menyebabkan Keri Stophet, Robert Padgett Partee, Taylor Wright Hixson, Paul A, dan Bharat Mehra Suwarno, saling nyambung dan mengutip. Dengan demikian, jaringan membentuk lingkaran yang tidak bisa dipecahkan.

## AFILIASI (ORGANISASI)



Gambar 4 : Publikasi Berdasarkan Diplomasi Publik Melalui Perpustakaan 2004 – 2022

Sumber: *database Dimensions AI 2004 - 2022* diolah oleh penulis

Berdasarkan data *Dimensions AI*, publikasi tertinggi berjumlah dua artikel yang diterbitkan oleh 8 universitas. Sitasi tertinggi artikel terdapat pada terbitan University of Thessaly dengan jumlah 38 kutipan dan yang terendah pada Royal Collage of Physicians, United Kingdom.

## B. STRATEGI DIPLOMASI PUBLIK MELALUI PERPUSTAKAAN

Strategi diplomasi publik melalui perpustakaan dapat menjadi sarana untuk membangun hubungan antarnegara dan meningkatkan pemahaman budaya. Berdasarkan penelitian terdahulu, perpustakaan, museum, dan pusat kebudayaan telah lama digunakan sebagai media dan alat kebijakan luar negeri dalam diplomasi budaya dan publik (Prieto Gutierrez, 2015). Diplomasi publik adalah serangkaian praktik dalam hubungan internasional untuk memengaruhi tindakan dengan menerapkan ide, gagasan, nilai, dan ideologi yang berujung pada kerja sama bilateral atau multilateral sesama aktor maupun komunitas internasional (Setiawan, 2019).

Berdasarkan *database Dimensions AI*, secara garis besar terdapat tiga tujuan dilibatkannya perpustakaan dan pusat kebudayaan dalam diplomasi publik di antaranya, *pertama mempromosikan identitas, cita-cita dan nilai-nilai nasional suatu negara*. Beberapa literatur menyebutkan bahwa perpustakaan, museum, dan pusat budaya adalah media bagi pemerintah dan komunitas untuk menyebarkan nilai-nilai nasional. Pemerintah melalui perpustakaan dan pusat kebudayaan memiliki peran besar sebagai agen memperkenalkan nilai-nilai nasional kepada publik di negara lain dalam rangka mempromosikan budaya politik (Vanc & Fitzpatrick, 2016).

Beberapa penelitian menganalisis beberapa fenomena kampanye politik cita-cita demokrasi, beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti partisipasi warga negara, kebebasan berekspresi, kesetaraan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia melalui berbagai literatur dan koleksi publikasi perpustakaan. Sebaliknya, negara-negara dengan nilai-nilai komunis juga mempromosikan identitasnya melalui perpustakaan untuk menyebarkan cita-cita budaya dan politik (Vanc & Fitzpatrick, 2016).

*Kedua, mempromosikan kreativitas dan inovasi suatu negara*. Selain mempromosikan nilai-nilai nasional, diplomasi publik melalui perpustakaan juga bertujuan untuk mempromosikan kreativitas dan inovasi suatu negara. Beberapa penelitian menemukan beberapa fenomena seperti, selama Perang Dingin, media cetak, komunikasi radio, dan film

digunakan untuk menyebarkan budaya populer. Selain itu, penelitian (2018) mengungkapkan bahwa program bahasa Pusat Kebudayaan Korea di Meksiko telah menjangkau kelompok pemuda yang tertarik dengan budaya pop Korea. Tidak hanya melalui sarana literatur, strategi diplomasi publik juga berkaitan erat dengan implementasi diplomasi budaya. Penelitian Iwabubuchi (2015) mengungkapkan, Pemerintah Jepang memanfaatkan Japan Foundation sebagai sarana diplomasi untuk mempromosikan anime, makanan, dan *video game* untuk meningkatkan citra internasional Jepang.

*Ketiga, propaganda budaya.* Literatur-literatur yang telah dikumpulkan melalui *database Dimensions AI* juga menunjukkan bahwa perpustakaan juga dijadikan sebagai alat propaganda budaya untuk memperluas pengaruh pemerintah di level internasional, khususnya selama Perang Dunia II dan periode Perang Dingin. Tujuan dari propaganda budaya ini adalah untuk mencapai kepentingan nasional dengan melibatkan budaya. Meskipun memiliki satu tujuan yaitu untuk mencapai kepentingan nasional, propaganda dan diplomasi publik memiliki metode yang berbeda. Di mana pada diplomasi publik memungkinkan ruang diskusi dan komunikasi bagi para pihak yang menerima informasi, sedangkan propaganda hanya bersifat satu arah antara pelaku budaya dan penerima. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Republik Rakyat Tiongkok, dan Uni Soviet tercatat telah berupaya memperluas kekuatan hegemonik dan geopolitik melalui propaganda budaya melalui perpustakaan. Dalam praktik perpustakaan konteks propaganda budaya dikaitkan dengan propaganda informasi dan koleksi seni visual dengan tujuan untuk menyebarkan cita-cita politik (Aisyah, 2022).

*Keempat, membangun hubungan lintas budaya.* Strategi diplomasi publik dalam membangun hubungan lintas budaya dalam konteks perpustakaan dilakukan dengan membangun hubungan komunikasi dan pertukaran budaya dua arah antara agen budaya dan penerima. Hubungan atau komunikasi lintas budaya tersebut juga dapat terjalin melalui kerja sama antar berbagai aktor seperti lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesional seperti Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Federasi Internasional Asosiasi dan Lembaga Perpustakaan (IFLA), dan ALA (Saryusz-Wolska et al., 2022).

Alasan dimanfaatkannya perpustakaan sebagai alat diplomasi publik karena perpustakaan merupakan salah satu media informasi masyarakat

suatu negara, sehingga turut berperan dalam memilah dan menyebarkan ke khalayak luas. Berdasarkan literatur yang dikumpulkan dari *database Dimensions AI*, ditemukan beberapa strategi diplomasi publik melalui perpustakaan yang telah dilakukan oleh beberapa negara di antaranya:

### 1. Program Kerja Sama dan Hibah Buku Perpustakaan

Beberapa literatur menggambarkan bahwa salah satu strategi pemerintah dalam melakukan diplomasi publik melalui perpustakaan adalah dengan melihat penggunaan, buku, koleksi perpustakaan, informasi, serta materi yang dijadikan sebagai referensi riset ilmiah. Strategi tersebut telah diterapkan oleh beberapa negara seperti, Kanada, Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat (Morinaka, 2019).

Sebagai pemenang Perang Dingin, Amerika Serikat berupaya untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi ke berbagai negara melalui program perpustakaan. Salah satu contoh implementasi diplomasi publik melalui perpustakaan yang dilakukan Amerika Serikat adalah program Franklin Books yang bertujuan mempromosikan citra dan nilai-nilai kebebasan dan demokrasi Amerika. Program ini direalisasikan dengan mendistribusikan buku dan mendirikan perpustakaan di negara-negara berkembang, khususnya di Asia Tenggara. Di wilayah lain seperti, Timur Tengah, program Buku Franklin telah membantu menerjemahkan buku-buku Amerika ke dalam bahasa lokal, menyediakan materi yang sesuai untuk perpustakaan sekolah, dan merangsang pengembangan pendidikan di masyarakat lokal sebagaimana di Pakistan dan Afghanistan (Vanc & Fitzpatrick, 2016).

Strategi ini dilakukan pada saat Perang Dingin, di mana sebagian besar negara di negara-negara berkembang, khususnya di Asia, sangat bergantung pada perolehan buku-buku yang ditujukan untuk literasi dan pendidikan sekolah melalui program hibah buku. Di Finlandia, pemerintah Amerika Serikat juga memberikan hibah untuk pengadaan buku teks Amerika untuk perpustakaan akademik dan publik di Finlandia. Dengan demikian, program hibah bantuan buku tersebut menghasilkan minat yang lebih besar terhadap budaya dan kebijakan Amerika serta membangun kepercayaan dan kemitraan yang langgeng antara Amerika Serikat dengan berbagai negara di Asia dan Finlandia (Aisyah, 2022).

Selain program Franklin Books, penelitian yang dilakukan Glant (2016) mengungkapkan United States Information Agency (USIA) berupaya untuk mempromosikan budaya Amerika Serikat di Hungaria melalui promosi teks sastra dan cerita fiksi pada periode Perang Dingin.

Pada tahun 1942, pemerintah AS bermitra dengan Rockefeller Foundation dan ALA mendirikan perpustakaan dan ruang baca tempat mereka dapat menawarkan kursus bahasa Inggris kepada orang-orang Meksiko (Aisyah, 2022). Di Brasil, pemerintah Amerika Serikat memfasilitasi program penerjemahan literatur Brasil dan Portugis ke dalam bahasa Inggris dan buku-buku sejarah Amerika Serikat ke dalam bahasa Portugis untuk memajukan pertukaran bahasa dan literatur antara Brasil dan AS, yang difasilitasi oleh pustakawan, penulis, penerbit, dan penerjemah (Morinaka, 2019). Alasan dipilihnya buku sebagai media utama dalam diplomasi publik melalui perpustakaan adalah memperluas penyebaran bahasa untuk saling berbagai pengetahuan sekaligus memfasilitasi kegiatan pertukaran budaya serta menjadi wadah untuk debat dan pembicaraan politik pada saat itu.

Selain Amerika Serikat, Pemerintah Prancis juga melakukan diplomasi publik dengan berinvestasi dalam bentuk buku sebagai instrumen untuk penyebaran nilai – nilai demokrasi di seluruh perpustakaan Afrika. Selain itu, Pemerintah Tiongkok juga telah memanfaatkan buku-buku dan informasi di berbagai pusat kebudayaan Tiongkok di berbagai negara untuk lebih mempromosikan budaya tradisional Tiongkok dan memberikan informasi kepada mereka yang ingin belajar atau bepergian di Tiongkok (Aisyah, 2022).

Kanada juga bergabung dengan negara-negara tetangga selama Perang Dingin dengan memajukan proyek-proyek buku Canadiana ke berbagai yang menghasilkan program-program studi Kanada di Asia dan Eropa. Saat ini, negara-negara Asia seperti Tiongkok dan Korea Selatan telah menggunakan program-program bahasa sebagai alat untuk diplomasi publik dan budaya melalui buku – buku perpustakaan dan memfasilitasi kelas-kelas bahasa di pusat-pusat budaya masing-masing untuk mempromosikan kesadaran dan apresiasi budaya (Hernández, 2018). Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa Qatar telah menggunakan museum, universitas, dan perpustakaan nasionalnya untuk melaksanakan diplomasi pendidikan dengan universitas, perpustakaan, dan museum di negara lain yang memosisikan Qatar sebagai pusat pendidikan untuk pendidikan tinggi internasional (Eggeling, 2017).

Inisiatif-inisiatif literasi, pendidikan, dan membaca merupakan salah satu alat perpustakaan untuk program-program diplomasi budaya dan publik. Beberapa studi secara khusus menggambarkan program-program pendidikan seperti klub-klub buku dan kelompok-kelompok percakapan, program-program literasi untuk orang dewasa dan dewasa muda, dan

kegiatan-kegiatan mendongeng dengan anak-anak untuk terlibat dengan budaya asing (Aisyah, 2022). Hernandez (2018) menyebutkan bahwa memanfaatkan kegiatan-kegiatan pendidikan dan debat-debat sosial mendorong interaksi sosial dengan masyarakat internasional dari pusat-pusat budaya. Asosiasi profesional seperti IFLA dan ALA membentuk program perpustakaan saudara di perpustakaan umum yang bertujuan untuk berkolaborasi dan bertukar ide dengan perpustakaan mitra di luar negeri, khususnya terkait pembahasan tentang cara menjalankan dan melaksanakan kegiatan literasi membaca dan edukasi untuk anak-anak dan remaja di komunitas yang beragam dan multikultural (Bordonaro, 2017).

## **2. Program Kepustakawanan dan Pertukaran Pustaka**

Selain kerja sama dalam bentuk hibah untuk menambah koleksi bahan bacaan di perpustakaan, strategi diplomasi publik melalui perpustakaan juga dilakukan melalui program kepustakawanan dan pertukaran pustaka. Sebagai aktor utama yang bertanggung jawab untuk mengatur dan pengembangan koleksi bacaan, pustakawan memegang peranan besar dalam inisiasi kerja sama perpustakaan dengan pihak lain termasuk dengan perpustakaan dari negara lain. Beberapa penelitian membahas praktik manajemen perpustakaan dan keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk mengatur koleksi; namun, beberapa menyebutkan pertukaran pendidikan perpustakaan sebagai salah satu upaya untuk mempelajari praktik perpustakaan di berbagai negara. Beberapa program kerja sama kepustakawanan yang dapat diinisiasi seperti kunjungan, konsultasi, dan survei perpustakaan, penyusunan katalog dan klasifikasi, akuisisi dan pengembangan koleksi, penerbitan dan penerjemahan, dan pelatihan perpustakaan serta program pertukaran untuk transfer pengetahuan ke negara dan lembaga mitra. Beberapa penelitian yang membahas tentang kerja sama antar perpustakaan seperti pertukaran dan program budaya perpustakaan; kepustakawanan, pelatihan perpustakaan, dan teknologi perpustakaan; dan kemitraan dengan asosiasi profesional, seperti IFLA dan lembaga akademik serta universitas digunakan untuk informasi dan propaganda budaya guna memenangkan kesetiaan di luar negeri (Aisyah, 2022; Morinaka, 2019). Program pertukaran pustaka ini melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah maupun aktor nonpemerintah, termasuk organisasi profesional dan yayasan swasta, sehingga menjadi salah satu strategi dalam diplomasi publik melalui perpustakaan.

### 3. Pameran Seni Visual

Selain berperan sebagai institusi pengelola koleksi karya tulis, cetak, dan/atau rekam, fungsi perpustakaan juga mengalami perluasan dengan berperan sebagai aktor dalam hal pelestarian budaya dan informasi. Beberapa penelitian mengungkapkan, pertunjukan seni visual di perpustakaan dikembangkan sebagai salah satu media strategi diplomasi publik untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat negara lain. Strategi ini juga termasuk ke dalam implementasi diplomasi budaya suatu negara. Terdapat penelitian yang mengungkapkan bahwa Inggris memelopori program budaya untuk kemitraan dengan negara-negara di Afrika dan Timur Tengah serta dengan India dan Tiongkok melalui British Library dan British Museum (Vanc & Fitzpatrick, 2016).

Pameran dan pertunjukan budaya di perpustakaan digambarkan sebagai strategi implementasi untuk hubungan budaya dan diplomasi. Beberapa penelitian juga mengutip penggunaan pameran lintas budaya untuk memajukan pemahaman budaya di antara warga negaranya, seperti dalam kolaborasi budaya Singapura dan Prancis, inisiatif Qatar dan Singapura pada pameran seni dan budaya Islam, dan kasus pameran lintas budaya adat antara AS dan Australia. Dalam kasus Qatar dan Kuwait, peradaban dan seni Islam telah menjadi agen diplomatik museum untuk memperkenalkan budaya Arab secara global dan menciptakan pemahaman budaya dengan berbagai negara (Aisyah, 2022) .

Faktor utama dalam penggunaan pameran seni dan budaya untuk kebijakan luar negeri adalah kebutuhan pemerintah dan lembaga budaya untuk memajukan warisan budaya secara internasional. Praktik pelestarian warisan tidak dilihat sebagai perhatian satu negara, melainkan tindakan dan tantangan bersama yang harus ditangani melalui hubungan dan kerja sama budaya. Dengan demikian, praktik museologi dan warisan budaya yang melibatkan profesional museum seperti kurator, arkeolog, dan konservator tidak hanya dianggap sebagai agen dan instrumen untuk diplomasi publik melainkan juga menekankan pada aspek diplomasi budaya (Aisyah, 2022).

Salah satu contohnya adalah proyek konservasi AS, Italia, Jerman, Hungaria, dan Turki yang melibatkan situs monumen sebagai tempat dan objek untuk kerja sama budaya, yang didukung dengan program pertukaran museum dan pendidikan serta hibah keuangan untuk memungkinkan kerja sama. Lebih jauh, Jepang telah menjadi pendukung warisan budaya terkemuka, menyebarluaskan praktik museum melalui program pertukaran dan hibah bantuan asing langsung ke luar negeri.

Selain itu, Rusia dan Tiongkok telah berkolaborasi untuk apa yang disebut pengembangan pariwisata merah melalui proyek hibah warisan budaya dan program pertukaran museum antara kedua negara (Aisyah, 2022).

### C. Efektivitas Diplomasi Publik Melalui Perpustakaan

Berdasarkan *database Dimensions AI*, pada umumnya temuan literatur mendiskusikan tentang peran perpustakaan sebagai alat propaganda pemerintah untuk menyebarkan nilai-nilai politik dan budaya. Namun, melansir Aisyah (2022) belum ada publikasi ilmiah yang menggunakan diplomasi perpustakaan sebagai kerangka teoritis untuk menggambarkan realitas dan fenomena saat ini, sehingga efektivitas diplomasi publik melalui perpustakaan perlu dikaji lebih mendalam.

Berdasarkan *database Dimensions AI*, literatur terkait diplomasi publik dan perpustakaan juga belum melibatkan sudut pandang penerima budaya. Sehingga, terdapat *gap* tentang efektivitas hasil dan kinerja program diplomasi publik melalui perpustakaan terhadap kepentingan nasional dan citra suatu negara. Namun, terlepas dari ini, nilai perpustakaan sebagai instrumen pendidikan dan penyebaran nilai-nilai demokrasi tetap memberikan pengaruh positif bagi masyarakat di berbagai negara. Kerja sama terkait diplomasi melalui perpustakaan sebagian besar terikat dan diatur oleh kedutaan besar, konsulat, dan organisasi budaya mitra, yang sebagian besar diamanatkan oleh agenda kebijakan luar negeri pemerintah. Dengan demikian hal ini juga mampu meningkatkan dan mempererat hubungan lintas budaya antar negara (Aisyah, 2022).

Selain itu, diplomasi publik melalui perpustakaan juga harus berhadapan dengan fenomena digitalisasi sehingga harus terus mengikuti perkembangan teknologi untuk mendukung kebutuhan pengguna yang terus berubah. Munculnya internet dan teknologi informasi merevolusi akses informasi bagi masyarakat. Diperkenalkannya sumber daya elektronik yang berujung pada masifnya penggunaan email dan *e-resources* di perpustakaan dan pusat sumber informasi juga menjadi tantangan baru terkait diplomasi publik melalui perpustakaan. Fenomena lain yang muncul adalah penggunaan media sosial untuk diplomasi publik. Misalnya, istilah *Twitplomacy* yang merujuk pada fenomena diplomasi publik yang dilakukan oleh pemerintah melalui postingan - postingan di Twitter.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil *database Dimensions AI* dan analisis *VOS Viewers* terdapat 1024 publikasi yang membahas mengenai diplomasi publik dan perpustakaan dari rentang 2004 – 2022. Penelitian juga memperlihatkan bahwa tren publikasi terkait tema diplomasi publik dan perpustakaan bersifat fluktuatif setiap tahunnya. Selain itu, artikel juga dipublikasikan di beragam tempat publikasi dengan tema yang bervariasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebelum adanya digitalisasi, perpustakaan memiliki peran strategis dalam diplomasi publik. Adapun tujuan dari dilibatkannya Melalui berbagai strategi, termasuk promosi identitas nasional dan inovasi budaya, perpustakaan adalah mempromosikan nilai-nilai nasional, inovasi dan kreativitas suatu negara, propaganda budaya, dan membangun hubungan lintas budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, adapun strategi yang dapat digunakan adalah melalui program kerja sama dan hibah buku, program kerja sama kepestakawanan dan pertukaran pustaka serta pameran seni visual. Meskipun demikian, nilai perpustakaan sebagai instrumen pendidikan dan penyebaran nilai-nilai demokrasi tetap memberikan pengaruh positif bagi masyarakat asing di seluruh dunia.

## REFERENSI

- Aisyah, S. (2022). *Libraries, museums, and cultural centers in foreign policy Journal of Documentation and cultural diplomacy: a scoping review. August, 1–19.*
- Bordonaro, K. (2017). The Experience of International Students at Cross-Border University Libraries. *International Journal of Librarianship, 2(2), 46.*  
<https://doi.org/10.23974/ijol.2017.vol2.2.20>
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research, 133(May), 285–296.*  
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Eggeling, K. A. (2017). Cultural diplomacy in Qatar: between ‘virtual enlargement’, national identity construction and elite legitimization. *International Journal of Cultural Policy, 23(6), 717–731.*  
<https://doi.org/10.1080/10286632.2017.1308505>
- Endarti, S. (2022). Perpustakaan Sebagai Tempat Rekreasi Informasi. *ABDI PUSTAKA: Jurnal Perpustakaan Dan Kearsipan, 2(1), 23–28.*  
<https://doi.org/10.24821/jap.v2i1.6990>
- Glant, T. (2016). US-Hungarian Relations Ten Years After 1956. *Hungarian*

*Cultural Studies*, 9(October 2016), 184–196.  
<https://doi.org/10.5195/ahea.2016.262>

Hernández, E. L. T. (2018). Public diplomacy, soft power and language: The case of the Korean language in Mexico City. *Journal of Contemporary Eastern Asia*, 17(1), 27–49. <https://doi.org/10.17477/jcea.2018.17.1.027>

Išoraitė, M. (2018). Brand Image Theoretical Aspects. *Integrated Journal of Business and Economics*, 2(1), 116. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v2i1.64>

Iwabuchi, K. (2015). Pop-culture diplomacy in Japan: Soft power, nation branding and the question of ‘international cultural exchange.’ *International Journal of Cultural Policy*, 21(4), 419–432.  
<https://doi.org/10.1080/10286632.2015.1042469>

Morinaka, E. M. (2019). Books, cultural exchanges, and international relations: Brazil and the United States in a context of war (1941-1946). *Varia Historia*, 35(69), 691–722. <https://doi.org/10.1590/0104-87752019000300002>

Prayuda Rendi, & Sundari Rio. (2020). Diplomasi Dan Power: Sebuah Kajian Analisis. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 3 No. 02.  
<https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index>

Prieto Gutierrez, J. J. (2015). World libraries, the diplomatic role of cultural agencies. *European Review*, 23(3), 361–368.  
<https://doi.org/10.1017/S1062798715000137>

Undang-Undang RI 1945, 245 (2007). [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf)

Saryusz-Wolska, M., Wawrzyniak, J., & Wóycicka, Z. (2022). New constellations of mnemonic wars: An introduction. *Memory Studies*, 15(6), 1275–1288.  
<https://doi.org/10.1177/17506980221133733>

Setiawan, A. (2019). Teori dan Praktik Diplomasi. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SYSTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SYSTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)

Vanc, A. M., & Fitzpatrick, K. R. (2016). Scope and status of public diplomacy research by public relations scholars, 1990-2014. *Public Relations Review*, 42(3), 432–440. <https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2015.07.012>

Wangke, H. (2020). Diplomasi Digital dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia. In *Diplomasi Digital dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia* (Vol. 1).